

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH DI DESA ADAT YEH SANIH**

Oleh

Made Kharisma Putri, NIM 2014101006

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini secara umum merupakan wujud proses mengungkap terkait persoalan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya mengkaji pada ketentuan dari Pasal 3 UUPA terhadap hak ulayat atas tanah *pelaba* pura di Desa Adat Yeh Sanih dan menganalisis kepastian hukum serta upaya masyarakat Desa Adat Yeh Sanih dalam mempertahankan hak ulayat atas tanah *pelaba* pura di Desa Adat Yeh Sanih. Untuk mempermudah penelitian ini metode yang dipergunakan ialah penelitian hukum empiris serta sifat penelitian yang deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Yeh Sanih dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan studi dokumen. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* agar sampel dapat untuk mewakili tujuan penelitian dan mencegah keluarnya dari topik pembahasan serta hasil yang didapatkan relevan serta akurat. Hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan bantuan dari metode penelitian ini adapun hasil yang didapatkan yaitu bahwa penghormatan terhadap hak ulayat diperkuat dengan adanya justifikasi pengaturan dari segi implementasi Pasal 3 UUPA. Pembuktian pada tanah *pelaba* pura sebagai aset desa adat dapat untuk dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan kepemilikan secara turun-temurun. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah dengan melakukan pendaftaran tanah yang sudah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Saran yang dapat diberikan untuk lebih memberikan informasi terkait pentingnya pendaftaran tanah terlebih pada aset desa sehingga desa dapat untuk melakukan pendataan tanah pada aset desa yang belum memiliki sertifikat sehingga hak terhadap tanah tersebut dapat terlindung.

Kata kunci : UUPA, *Pelaba Pura*, Implementasi, Hak ulayat, Sertifikat

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 OF LAW NUMBER 5 OF 1960
CONCERNING BASIC AGRARIAN REGULATION ON CUSTOMARY LAND
RIGHT IN YEH SANIH TRADITIONAL VILLAGE**

By

Made Kharisma Putri, Student ID Number 2014101006

Law Study Program

ABSTRACT

This research aims to generally uncover issues related to the problems found in Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principle, especially examining the provisions of Article 3 of UUPA regarding customary right over the pelaba pura land in Yeh Sanih Customary Village and analyzing the legal certainty and efforts of the Yeh Sanih Customary Village community in maintaining customary rights over the pelaba pura land in Yeh Sanih Customary Village. To facilitate this research, the method used is empirical legal research with a descriptive nature. The research location is conducted in Yeh Sanih Customary Village using data collection techniques through observation, interviews, and document studies. Sample determination uses purposive sampling so that the sample can represent the research objectives and prevent deviation from the discussion topics, as well as obtaining relevant and accurate result. The research result are processed using qualitative analysis. With the assistance of this research method, the result obtained are that the respect for customary rights is strengthened by the justification of the implementation aspect of Article 3 of UUPA. Proof of pelaba pura land as customary village assets can be demonstrated by certificate ownership and hereditary ownership. To ensure legal certainty over land, land registration is carried out as regulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. Suggestions that can be given are to provide more information regarding the importance of land registration, especially for village assets, so that the village can conduct land registration for village assets that do not yet have certificates, thus protecting rights to the land.

Key words : UUPA, Pelaba pura, Implementation, customary rights, certificate